

**PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENGENDALIAN PENYELENGGARA PEMBERANGKATAN IBADAH
UMRAH (PPIU) BERBASIS *PREVENTION CONTROLLING HYBRID
SYSTEM (PCHS)***



TESIS

Disusun Oleh :

SARIP SAHRUL SAMSUDIN

NPM : 221003631010581

Program Studi: Magister Ilmu Administrasi

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN



PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN PENYELENGGARA PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH (PPIU) BERBASIS *PREVENTION CONTROLLING HYBRID SYSTEM (PCHS)*

SARIP SAHRUL SAMSUDIN

NPM : 221003631010581

Program Studi: Magister Ilmu Administrasi

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Ilmu Administrasi, telah disetujui oleh pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah ini Semarang, September 2024.

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
NIDN. 0618056501

Pembimbing II

Dr. Dra. Karmanis, M.Si
NIDN. 0605066601

Menyetujui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN



PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN PENYELENGGARA PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH (PPIU) BERBASIS *PREVENTION CONTROLLING HYBRID SYSTEM (PCHS)*

SARIP SAHRUL SAMSUDIN

NPM : 221003631010581

Program Studi: Magister Ilmu Administrasi

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Ilmu Administrasi telah disetujui Tim Penguji dan disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal seperti tertera di bawah ini Semarang, September 2024

1. Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
Ketua tim penguji/ Pembimbing 1
2. Dr. Dra. Karmanis, M.Si
Penguji 1/ Pembimbing 2
3. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
Penguji 2

.....
.....
.....

Mengesahkan,
Dekan FISIP UNTAG Semarang



Prof. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, M.S
NIDN. 0621105901

ABSTRAK

Ibadah umrah banyak diminati masyarakat, namun banyak oknum PPIU yang melakukan penyelewengan sehingga merugikan masyarakat. Kementerian Agama mempunyai program pengendalian melalui monitoring dan evaluasi, namun pelaksanaannya banyak terdapat kekurangan. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kondisi faktual kebijakan pengendalian penyelenggara pemberangkatan ibadah umrah yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada PPIU dan untuk mendeskripsikan serta menganalisa faktor penghambat dan pendukung pengembangan pengendalian dengan berbasis *Prevention Controlling Hybrid System* atau PCHS. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dan data dianalisa dengan menggunakan SWOT serta AHP. Hasil penelitian: 1) kondisi faktual kelemahan monitoring dan evaluasi yakni tidak adanya instrument, tidak adanya perencanaan, petugas kurang berkompeten, waktu pelaksanaan tidak tepat, kurangnya anggaran, tidak adanya evaluasi; 2) untuk membangun pengendalian PPIU melalui monitoring dan evaluasi harus dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal sehingga diperoleh strategi yang tepat, strategi yang tepat menurut analisis SWOT adalah kombinasi antara *strength-opportunity*, selanjutnya strategi tersebut diuraikan berdasarkan skala prioritas dengan analisis AHP dan diperoleh alternatif strategi mengedepankan tanggungjawab peran, *credibility*, integritas, proses pembuatan keputusan dan keterwakilan forum serta memanfaatkan temuan. Dengan demikian ditemukan pendekatan yang tepat untuk pelaksanaan pengendalian dengan menggunakan *Prevention Controlling Hybrid System* sebagai suatu pengendalian dengan metode umpan maju, dapat dilakukan oleh siapapun dengan hasil yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ini perlu adanya kebijakan publik. Kesimpulan: pengendalian pada PPIU dibangun berdasarkan strategi dan alternatif kriteria yang diperoleh dari aspirasi stakeholder untuk dapat mencari solusi dengan menggunakan kebijakan publik.

Kata kunci: PPIU, pengendalian, penipuan biro umrah, monitoring, evaluasi